

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program selalu diarahkan untuk mencapai tujuannya. Salah satu faktor yang menjadi kriteria untuk mencapai kelancaran tujuan suatu organisasi atau instansi adalah mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawainya. Organisasi merupakan suatu kesatuan kompleks yang berusaha mengalokasikan sumber daya manusia secara penuh demi tercapainya suatu tujuan. Apabila suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut efektif.

Seiring dengan kemajuan zaman, sebagai suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat, instansi pemerintah juga dituntut mampu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan-perkembangan yang terjadi serta terus melakukan perubahan-perubahan. Tercapainya tujuan organisasi sangat ditentukan dari kinerja dan keefektifan para pegawai dalam menjalankan tugas. Setiap organisasi pada umumnya mengharapkan para pegawainya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, produktif dan profesional. Semua ini bertujuan agar organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi, sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas pelayanan masyarakat yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Sampai saat ini, terdapat berbagai nomenklatur untuk pegawai yang berstatus tidak tetap di instansi pemerintah, seperti Tenaga Honorer, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Tenaga Ahli, Pegawai Kontrak, Tenaga Pendamping, dan lain sebagainya. Namun, di kalangan masyarakat, istilah tenaga honorer lebih dikenal untuk merujuk pada pegawai yang bersifat tidak tetap di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 diterbitkan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagai landasan operasional bagi sekretariat daerah, dinas, badan, kecamatan, dan instansi pendukung lainnya. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terjadi penyelarasan antara kewenangan, tugas, fungsi, serta prosedur kerja antar perangkat daerah, sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dan pelayanan publik dapat ditingkatkan.

Tenaga honorer bertujuan untuk mendukung kinerja ASN dalam melaksanakan fungsi pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan publik. Penerimaan tenaga honorer di daerah seringkali tidak mengikuti prosedur yang jelas. Ketiadaan persyaratan khusus, seperti jenjang pendidikan minimal, menyebabkan banyak tenaga honorer hanya berpendidikan SMA atau setara. Padahal, jika dikaitkan dengan tugas utama ASN, tenaga honorer juga seharusnya memiliki tingkat pendidikan yang memadai karena mereka turut membantu tugas ASN baik di kantor maupun di lapangan. Tenaga honorer idealnya memiliki pemahaman tentang manajemen, teknologi informasi, dan sistem pelayanan

publik. Namun, perlu ditegaskan bahwa tenaga honorer hanya berperan mendukung tugas ASN, bukan menggantikan peran atau tugas utama ASN.

Pada tahun 2025, keberadaan tenaga honorer di Kabupaten Balangan mengalami perubahan signifikan seiring dengan kebijakan pemerintah mengenai penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, mulai awal tahun 2025 sebenarnya tidak ada lagi istilah tenaga honorer. Pegawai dengan masa kerja di bawah dua tahun dialihkan statusnya menjadi Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP), sedangkan pegawai dengan masa kerja di atas dua tahun yang telah mengikuti seleksi (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) PPPK tahap II tahun 2024 sebagian besar diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi dalam manajemen kepegawaian daerah, di mana pola rekrutmen dan pengelolaan pegawai diarahkan untuk lebih profesional dan sesuai kebutuhan birokrasi. Perubahan status tersebut juga membawa implikasi terhadap kinerja, motivasi, serta peran pegawai dalam mendukung pelayanan publik di Kabupaten Balangan, khususnya pada perangkat daerah seperti Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan tersebut, dengan tugas utama memberikan pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi dan penyelenggaraan statistik sektoral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Keberadaan perangkat daerah ini sangat penting karena mendukung transparansi informasi, penyebaran data, serta

penguatan sistem persandian guna menunjang keamanan informasi pemerintah daerah.

Berdasarkan data tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah tenaga honorer di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan tercatat sebanyak 79 orang, dengan lulusan S1 berjumlah 32 orang, lulusan D3 berjumlah 7 orang, lulusan SMA berjumlah 39 orang, lulusan SMP berjumlah 1 orang dan lulusan SD berjumlah 1 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar tenaga honorer masih memiliki keterbatasan latar belakang pendidikan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas kinerja, terutama dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang memerlukan keterampilan khusus di bidang informasi dan komunikasi, aplikasi informatika, statistik dan persandian. Berdasarkan observasi penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Terdapat tenaga honorer yang belum bisa dalam menjalankan atau mengoperasikan komputer, khususnya dalam penggunaan aplikasi Microsoft Office, sehingga menghambat kelancaran penyelesaian pekerjaan administrasi.
- 2) Tidak tepatnya waktu penyelesaian pekerjaan. Belum konsistennya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan, beberapa tugas administrasi tidak dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas. Hal ini terlihat dari adanya pekerjaan yang tertunda karena menunggu arahan dari pihak lain, sehingga penyelesaian pekerjaan menjadi kurang efektif.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang **“Kinerja Tenaga Honorer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada indikator kinerja pegawai yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2017:75), adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja
2. Kuantitas Kerja
3. Pelaksanaan Tugas
4. Tanggung Jawab

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja tenaga honorer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja tenaga honorer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja tenaga honorer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja tenaga honorer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan Kinerja Tenaga Honorer Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami kinerja tenaga honorer, organisasi dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi kerja.